

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA HARI KETIGA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA HARI KETIGA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2026
Pukul : 11.30 – 12.15 WIB
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Lamongan

- I.** Jenis Rapat : Paripurna
II. Sifat Rapat : Terbuka
III. Acara Rapat : 1. Pembukaan Rapat Paripurna
2. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
3. Penutupan Rapat Paripurna

IV. Pimpinan Rapat

Nama : Drs. H. KACUNG PURWANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan

V. Sekretaris Rapat

Nama : PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

VI. Jumlah Seluruh Anggota Dewan

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 12 orang

2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	10	orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	7	orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	6	orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	:	5	orang
6. Fraksi Partai Demokrat	:	5	orang
7. Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera	:	5	orang
JUMLAH	:	50	orang

VII. Jumlah Anggota Dewan Yang Hadir

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	11	orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	10	orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	5	orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	5	orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	:	5	orang
6. Fraksi Partai Demokrat	:	2	orang
7. Fraksi NasDeM Ummat Keadilan Sejahtera	:	5	orang
JUMLAH	:	43	orang

Yaitu :

1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.
2. H. ALI AFANDI
3. AH. MUJTABA, S.E.
4. NURHASYIM, S.IP.
5. SAIFUDDIN ZUHRI
6. ASLICHAH, S.Pd.
7. MAHFUD SHODIQ, S.Sos.
8. SUHERMAN
9. ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.

10. ANDRIYATI KUSUMAWARDANI
11. MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.

2) Fraksi Partai Golongan Karya

1. Drs. H. KACUNG PURWANTO
2. H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.
3. M. FAISOL RAMA HAKIM
4. TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.
5. DIDIK BIYANTO, S.H.
6. Ir. SUYATMOKO, M.M.
7. A. FATHONI, S.S.
8. MUDZAKIR
9. Drs. NA'IM, M.Ag.
10. Drs. MUTOYO, M.Pd.

3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. HUSEN, S.Ag., M.Pd.
2. ERNA SUJARWATI, S.Pd.
3. Hj. NING DARWATI
4. Ir. SUPONO
5. META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.

4) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.
2. Drs. H. SUHARTONO
3. ANSHORI, S.Sos.
4. SULASTRI, S.E.
5. H. SRINOTO, S.E.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

1. ALI MAKHFUDL, S.Ag., SH., MM
2. HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.
3. NASRUDIN, S.T.
4. WIJI, S.E.
5. AHMAD, S.Ag.

6) Fraksi Partai Demokrat

1. MIMMAS'IDAH, S.E.
2. BUDI SULIS SETIYO

7) Fraksi NUKS

1. MUSLIKH
2. H. TASIRIN, S.H., M.H.
3. ROFIU'UDIN
4. MUHAMMAD ZAHLUL KAHELIQBAL, S.Pn.
5. RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.

VIII. Jumlah Anggota Dewan Yang Tidak Hadir

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	: 0 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 2 orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	: 1 orang
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	: 0 orang
6. Fraksi Partai Demokrat	: 3 orang
7. Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera	: 0 orang

Jumlah : 7 orang

Yaitu :

1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.

2) Fraksi Partai Golongan Karya

1. -

3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. BUSONO ADI SUSANTO
2. AHMAD UMAR BUWANG, S.H.

4) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. DIMYATI, S.H.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

1. -

6) Fraksi Partai Demokrat

1. Ir. SUGENG SANTOSO
2. ALDINO HADY WIJAYA
3. BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ

7) Fraksi NUKS

1. -

IX. Undangan

1. Bupati Lamongan
2. Wakil Bupati Lamongan
3. Kapolres Lamongan
4. DANDIM 0812 Lamongan
5. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
6. Ketua Kejaksaan Negeri Lamongan
7. Ketua Pengadilan Agama Kab. Lamongan
8. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
9. Sekretaris DPRD
10. Staf Ahli Bupati
11. Asisten Sekretaris Daerah
12. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
13. Kepala Badan dan Kepala Dinas Perangkat Daerah Kab. Lamongan
14. Camat se-Kab. Lamongan

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026, dimulai.

Mengawali acara hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars Lamongan hadirin dimohon berdiri.

LAGU DIKUMANDANGKAN

Hadirin dimohon duduk Kembali. Kepada Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada Pimpinan Rapat.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(Drs. H. KACUNG PURWANTO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Sdr. Bupati;

Yang Terhormat Sdr. Wakil Bupati;

Yang Saya Hormati Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan rekan-rekan Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum Rapat Paripurna ini kita buka, Saya minta dari Sekretariat DPRD untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD dari masing-masing Fraksi. Dipersilahkan!

Sekretariat DPRD :

(USMAN, S.E., M.M. – Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan)

Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing Fraksi, pada Rapat Paripurna Hari Ketiga dalam rangka Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, sebagai berikut :

- Satu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 12, jumlah yang hadir 11, jumlah yang tidak hadir 1.
- Dua, Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 10, jumlah yang hadir 0, jumlah yang tidak hadir 0.
- Tiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 7, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 2.
- Empat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 6, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 1.
- Lima, Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 0.
- Enam, Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 2, jumlah yang tidak hadir 3.
- Tujuh, Fraksi NUKS, jumlah anggota 5, jumlah yang hadir 5, jumlah yang tidak hadir 0.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(Drs. H. KACUNG PURWANTO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Terima kasih.

Berdasarkan daftar hadir dari 50 Anggota Dewan yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi, telah hadir sebanyak 43 Anggota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, kuorum telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucap "Bismillahirrahmanirrahiim".

Rapat Paripurna Hari Ketiga dalam rangka Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari ini Senin, tanggal 22 Juni 2026 pukul 11.30 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUKAN PALU 3 KALI

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,

Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,

Menanggapi Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD pada Rapat Paripurna Hari Pertama tanggal 12 Juni 2026, masing-masing Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna Hari Kedua tanggal 17 Juni 2026.

Selanjutnya sesuai mekanisme tahapan pembahasan, pada hari ini diselenggarakan Rapat Paripurna Hari Ketiga dalam rangka penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi.

Untuk itu kepada Yth. Saudara Bupati kami persilahkan.

JAWABAN BUPATI

KEPALA DAERAH :

(Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA – Bupati Lamongan)



BUPATI LAMONGAN

JAWABAN EKSEKUTIF

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DALAM PEMBAHASAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Wakil Bupati Lamongan
- Yth. Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan,
- Yth. Sdr. Ketua MUI Kabupaten Lamongan, para wartawan, serta hadirin sekalian yang berbahagia.
- Rekan-Rekan Wartawan, Serta Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

Terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, masukan, pertanyaan, serta berbagai catatan strategis terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang telah disampaikan oleh:

1. Saudara Achmad Haikal Robbani, S.H., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Saudara Mudzakir, dari Fraksi Partai Golongan Karya;
3. Saudari Erna Sujarwati, S.Pd., M.Sos., dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Saudari Sulastri, S.E., dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
5. Saudara Nasrudin, S.T., dari Fraksi Partai Amanat Nasional;
6. Saudara Mimmas'idah, S.E., dari Fraksi Partai Demokrat;
7. Saudara Rofi'udin, S.Kom., dari Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera.

Pandangan dan masukan yang disampaikan merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan

pembangunan daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Apresiasi yang diberikan Fraksi-Fraksi DPRD atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesepuluh kali secara berturut-turut, serta perolehan Predikat "A" (Sangat Baik) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, kami terima sebagai bentuk dukungan sekaligus pengingat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan pandangan Fraksi-Fraksi, capaian tersebut harus bermuara pada peningkatan nilai manfaat publik (public value) yang semakin dirasakan masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik perlu diwujudkan dalam pelayanan yang semakin prima, pembangunan yang semakin efektif, serta hasil-hasil pembangunan yang semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Opini WTP dan Predikat SAKIP bukan sekadar capaian administratif, melainkan fondasi untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pertanggungjawaban APBD tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketepatan pelaporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut akan terus diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,

penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Pimpinan Dan Anggota Dprd Yang Saya Hormati;

Terhadap berbagai pandangan, saran, masukan, dan pertanyaan yang telah disampaikan Masing-Masing Fraksi DPRD, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah

- a) Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera atas kinerja penerimaan Pajak Daerah serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 21,70 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.
- b) Menanggapi pandangan dan saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera terkait proporsi PAD yang masih didominasi oleh sektor opsen, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan tata kelola,

digitalisasi sistem penerimaan daerah, serta pemutakhiran basis data potensi pendapatan. Di samping itu, pengawasan akan terus diperketat guna mencegah kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang lebih berkelanjutan.

2. Retribusi Daerah

Menanggapi pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terkait menurunnya kinerja Retribusi Daerah, serta catatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat mengenai realisasi Retribusi Daerah yang mencapai 97,37 persen, dapat kami jelaskan bahwa kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh belum tercapainya target penerimaan pada Retribusi Pelelangan Ikan dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Selain faktor tersebut, terdapat pula dampak penyesuaian regulasi sebagai konsekuensi implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menghapus beberapa jenis objek Retribusi Daerah, sehingga turut memengaruhi capaian penerimaan retribusi pada Tahun Anggaran 2025.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD)

Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera terhadap kinerja PT Bumi Lamongan Sejati yang mampu memberikan kontribusi realisasi dividen mencapai 177,48 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, menanggapi saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera yang memberikan perhatian terhadap penurunan hasil dividen secara umum serta kinerja Perumda Pasar dan Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh BUMD guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara optimal.

Penguatan kinerja BUMD terus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, mitigasi risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional (*good corporate governance*).

Adapun langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD, khususnya Perumda Pasar dan Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya, meliputi restrukturisasi manajemen, penataan *business plan* yang lebih adaptif terhadap dinamika usaha, serta penguatan orientasi pada profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pada Perseroda Bank Daerah Lamongan, upaya peningkatan kinerja difokuskan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara konsisten guna menjaga kualitas aset produktif dan menekan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL).

4. Lain-Lain PAD yang Sah dan Pendapatan Transfer

Terkait saran Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai perlunya strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer yang saat ini masih berada pada kisaran $\pm 78,8$ persen, Pemerintah Daerah telah menyiapkan roadmap peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Roadmap tersebut diarahkan melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, serta peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan terukur terhadap total pendapatan daerah. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus memitigasi risiko ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer.

B. BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi dan Belanja Bunga

- a) Terkait saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional agar capaian Belanja Operasi dapat terukur secara jelas dalam mendukung pelayanan publik yang bermutu, dapat disampaikan bahwa setiap pengeluaran Belanja Operasi dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang terukur serta didukung oleh upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui program pengembangan kapasitas dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- b) Berkenaan dengan pertanyaan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengenai Realisasi Belanja Bunga yang mencapai 43,74 persen dengan sisa pagu sebesar 710 juta 379 ribu 85 rupiah, dapat dijelaskan bahwa sisa pagu tersebut tidak terealisasi karena proses pencairan pinjaman pada lembaga keuangan perbankan baru terlaksana pada Triwulan IV, sehingga kebutuhan pembayaran bunga tidak sebesar yang telah dianggarkan.
- c) Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Golongan Karya terhadap efisiensi Belanja Operasi yang terealisasi sebesar 95,54 persen, yang dinilai sebagai cerminan pengelolaan kewajiban daerah yang terukur, efektif, dan sehat.
- d) Terkait pertanyaan dan saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah, Eksekutif berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas

aparatur melalui pembinaan berkelanjutan, penetapan target kinerja individu yang terukur, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara objektif dan berkeadilan. Sementara itu, terkait praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir sebagaimana menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat, Eksekutif menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pungutan liar melalui penguatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan pendapatan daerah, serta percepatan pembenahan tata kelola perparkiran agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

- e) Menyikapi saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait penyaluran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme verifikasi berjenjang yang didukung sistem e-Proposal pada SIPD guna menjamin ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

2. Belanja Modal (Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan)

Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan saran yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi NasDem UMMAT

Keadilan Sejahtera terhadap realisasi Belanja Modal yang sebagian besar dialokasikan pada sektor Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pembangunan infrastruktur agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan multiplier effect yang optimal terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian juga terus menjadi perhatian, mengingat perannya yang strategis dalam mendukung produktivitas pertanian dan peningkatan hasil panen sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer

- A.** Terkait pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengenai rendahnya penyerapan Belanja Tidak Terduga (BTT), dapat disampaikan bahwa realisasi BTT dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil yang bersifat mendesak dan keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penggunaan anggaran untuk pengembalian sisa dana bantuan keuangan khusus serta Dana BOS Tahun 2024 telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- B.** Atas persetujuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap realisasi Belanja Transfer sebesar 95,33 persen serta dorongan agar Belanja Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, Pemerintah Daerah

menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Masukan tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan penganggaran ke depan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan postur belanja yang produktif, adaptif, dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.

C. Sektor Pendidikan

- a) Menindaklanjuti saran Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Demokrat terkait kondisi fisik sekolah, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan melebihi mandatory spending sebesar 28 persen. Pemanfaatannya dilakukan secara seimbang melalui penguatan sarana dan prasarana SD/SMP negeri maupun swasta secara bertahap berdasarkan skala prioritas, serta intervensi penanganan anak putus sekolah melalui Inovasi AKSI BIRU, yakni gerakan mengembalikan anak tidak sekolah agar kembali memperoleh layanan pendidikan melalui bhakti insan guru. Upaya tersebut sekaligus mendukung keberhasilan Program Prioritas Perintis dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
- b) Menanggapi saran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan menyiapkan panitia pelaksana,

panen melalui dukungan pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan dalam menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

- b) Terkait ketersediaan pupuk, stabilitas harga gabah, serta perlunya penguatan mitigasi risiko cuaca, Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian guna mendukung keberlanjutan usaha tani serta meningkatkan hasil produksi sektor pertanian.
- c) Menindaklanjuti saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai harga kebutuhan pokok, Pemerintah Daerah mengoptimalkan gerakan pangan mandiri dan memperkuat koordinasi dengan Bulog untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sekaligus melindungi nilai jual hasil pertanian di tingkat petani.
- d) Mengenai saran Fraksi Partai Demokrat terkait penyediaan cold storage bagi petambak air tawar, Pemerintah Daerah menerima dengan baik usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan. Selain itu, layanan kesehatan hewan terpadu (Puskeswan) serta optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah potensial terus diperkuat guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan peternak.

- e) Menanggapi perhatian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dampak ekologis pembukaan kawasan hutan di Lamongan Selatan yang berpotensi menimbulkan erosi, krisis air, banjir, dan gangguan organisme pengganggu tanaman, EKSEKUTIF memberikan perhatian serius serta terus memperkuat koordinasi instansi lintas sektor guna mendorong langkah-langkah penanganan yang berkelanjutan.

F. Sektor Sosial, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Menanggapi masukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai ketimpangan data penerima bantuan sosial pasca transisi DTSEN, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial terus memperkuat proses verifikasi dan validasi data secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemutakhiran data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memantau perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.
- b) Menindaklanjuti saran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar pengawasan kepatuhan ketenagakerjaan semakin ditingkatkan, Dinas Tenaga Kerja terus mengintensifkan pengawasan secara berkala pada sektor industri guna menjamin pemenuhan hak-hak normatif pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana juga terus memperkuat koordinasi dengan

berbagai pihak dalam pembinaan serta standardisasi Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai langkah preventif untuk mewujudkan prinsip *zero violence* atau tanpa kekerasan terhadap anak.

G. Kesiapsiagaan Bencana

Menanggapi saran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai anggaran operasional penanggulangan kebencanaan di BPBD Lamongan, Pemerintah Daerah terus meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat melalui pembiayaan yang memadai, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Prioritas Lamongan Tangguh.

H. LAJU PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

- a) Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera terkait peningkatan SILPA, dapat disampaikan bahwa sebagian besar SILPA tersebut berasal dari akumulasi dana *earmarked*, yaitu dana yang secara regulatif telah ditetapkan peruntukannya sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b) Mencermati perhatian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap stabilitas Arus Kas dari Aktivitas Operasi serta arus kas investasi

yang tercatat minus 408 milyar 633 juta 809 ribu 245 rupiah 50 sen, Pemerintah Daerah akan terus memperkuat efektivitas pengelolaan investasi dan aset daerah agar setiap penempatan modal dan pengadaan aset tetap semakin selaras dengan tingkat pemanfaatannya, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro daerah.

Sementara itu, instrumen pinjaman daerah sebesar 44 milyar 689 juta 91 ribu 763 rupiah dikelola secara prudent, terukur, dan sesuai dengan batas kemampuan fiskal daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaannya juga didukung skema pengembalian yang aman, terencana, dan terkendali, sehingga tetap menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan kapasitas keuangan daerah.

I. PENATAUSAHAAN ASET DAN KEWAJIBAN NERACA

- a) Menanggapi saran Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi NasDem UMMAT Keadilan Sejahtera terkait kenaikan nilai Aset Tetap, Pemerintah Daerah berkomitmen menjamin keamanan legalitas aset melalui program sertifikasi tanah massal yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- b) Terkait kas BLUD, Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD telah melakukan percepatan penyerapan dana operasional guna menjamin

ketersediaan obat-obatan esensial serta mendukung optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

- c) Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi NasDem Ummat Keadilan Sejahtera mengenai keberhasilan menekan Kewajiban Daerah secara signifikan. Capaian tersebut merupakan hasil dari manajemen cash flow yang ketat, kepatuhan pembayaran tepat waktu kepada pihak ketiga, serta percepatan pelunasan pokok utang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Komitmen tersebut akan terus dipertahankan guna menjaga likuiditas, ketahanan fiskal, dan kesehatan struktur keuangan daerah secara berkelanjutan. Terkait rekomendasi mengenai pelaksanaan APBD ke depan, penguatan transformasi layanan digital di tingkat desa serta pengembangan lumbung pangan lokal akan terus menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan serta mendukung implementasi Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita Nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang dapat kami sampaikan. Berbagai masukan, saran, pertanyaan, dan rekomendasi yang telah disampaikan merupakan kontribusi penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Penguatan kapasitas fiskal, efektivitas belanja daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Kami meyakini bahwa kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bersama.

Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan, Semoga Allah S.W.T Senantiasa Memberikan Kekuatan Dan Keberkahan Kepada Kita Semua Dalam Menjalankan Amanah Pengabdian. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



PIMPINAN RAPAT PARIPURNA :

(Drs. H. KACUNG PURWANTO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Rapat Paripurna pada hari ini pukul 12.15 WIB kami nyatakan ditutup.

KETUKAN PALU 3 KALI

Sekian terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBAWA ACARA :

Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri.

LAGU BAGIMU NEGERI DIKUMANDANGKAN

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Demikian rangkaian acara Paripurna pada hari ini, terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Wakil Ketua,

Drs. H. KACUNG PURWANTO

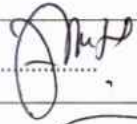
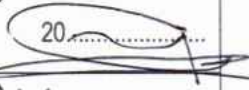
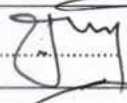
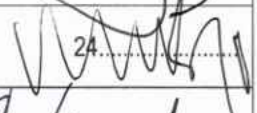
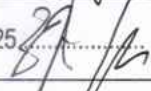
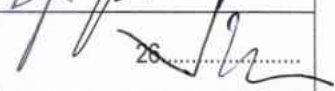
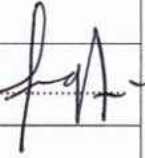
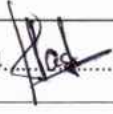
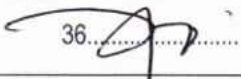
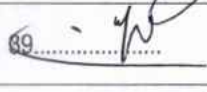


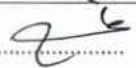
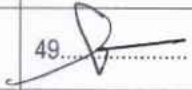
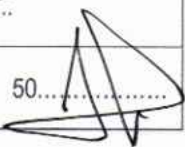
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

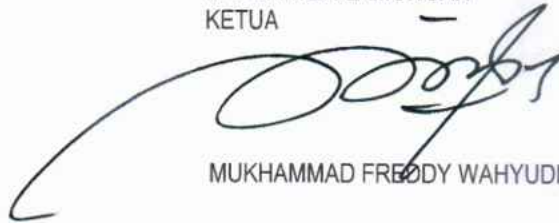
DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2025 HARI SENIN, TANGGAL 22 JUNI 2026

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.	KETUA	PKB	1.....
2	Drs. H. KACUNG PURWANTO	WAKIL KETUA	P.GOLKAR	2.....
3	HUSEN, S.Ag.,M.Pd	WAKIL KETUA	PDIP	3.....
4	IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.	WAKIL KETUA	P.GERINDRA	4.....
5	H. ALI AFANDI	ANGGOTA	PKB	5.....
6	AH MUJTABA, S.E.	ANGGOTA	PKB	6.....
7	NUR HASYIM, S.IP.	ANGGOTA	PKB	7.....
8	MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos.	ANGGOTA	PKB	8.....
9	MAHFUD SHODIQ, S.Sos.	ANGGOTA	PKB	9.....
10	SUHERMAN	ANGGOTA	PKB	10.....
11	FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.	ANGGOTA	PKB	11.....
12	ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.	ANGGOTA	PKB	12.....
13	SAIFUDDIN ZUHRI	ANGGOTA	PKB	13.....
14	ASLICHAH, S.Pd.	ANGGOTA	PKB	14.....
15	ANDRIATI KUSUMAWARDANI	ANGGOTA	PKB	15.....
16	H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.	ANGGOTA	P.GOLKAR	16.....
17	M. FAISOL RAMA HAKIM	ANGGOTA	P. GOLKAR	17.....
18	TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.	ANGGOTA	P. GOLKAR	18.....

19	DIDIK BIYANTO, S.H.	ANGGOTA	P. GOLKAR	19..... 
20	MUDZAKIR	ANGGOTA	P. GOLKAR	20..... 
21	A. FATHONI, S.S.	ANGGOTA	P. GOLKAR	21..... 
22	Ir. SUYATMOKO, M.M.	ANGGOTA	P. GOLKAR	22..... 
23	Drs. NA'IM, M.Ag.	ANGGOTA	P. GOLKAR	23..... 
24	Drs. MUTOYO, M.Pd.	ANGGOTA	P.GOLKAR	24..... 
25	ERNA SUJARWATI, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	25..... 
26	Ir. SUPONO	ANGGOTA	PDIP	26..... 
27	BUSONO ADI SUSANTO	ANGGOTA	PDIP	27.....
28	Hj. NING DARWATI	ANGGOTA	PDIP	28..... 
29	AHMAD UMAR BUWANG, S.H.	ANGGOTA	PDIP	29.....
30	META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	30..... 
31	H. SRINOTO, S.E.	ANGGOTA	P.GERINDRA	31..... 
32	Drs. H. SUHARTONO	ANGGOTA	P.GERINDRA	32..... 
33	DIMYATI, S.H.	ANGGOTA	P.GERINDRA	33.....
34	SULASTRI, S.E.	ANGGOTA	P.GERINDRA	34..... 
35	ANSHORI, S.Sos.	ANGGOTA	P.GERINDRA	35..... 
36	ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.	ANGGOTA	PAN	36..... 
37	NASRUDIN, S.T.	ANGGOTA	PAN	37.....
38	HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PAN	38..... 
39	WIJI, S.E.	ANGGOTA	PAN	39..... 
40	AHMAD, S.Ag.	ANGGOTA	PAN	40..... 

41	MIMMAS'IDAH, S.E.	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	41..... 
42	Ir. SUGENG SANTOSO	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	42.....
43	BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	43.....
44	ALDINO HADY WIJAYA	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	44.....
45	BUDI SULIS SETIYO	ANGGOTA	P. DEMOKRAT	45..... 
46	MUHAMMAD ZAHLUL KAHEL IQBAL, S.Pn.	ANGGOTA	NUKS	46.....
47	MUSLIKH	ANGGOTA	NUKS	47..... 
48	RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.	ANGGOTA	NUKS	48..... 
49	H. TASIRIN, S.H., M.H.	ANGGOTA	NUKS	49..... 
50	ROFI'UDIN	ANGGOTA	NUKS	50..... 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
KETUA



MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.



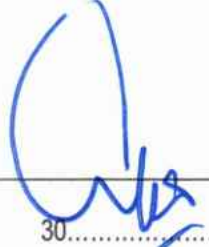
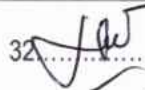
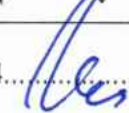
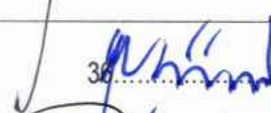
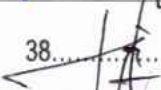
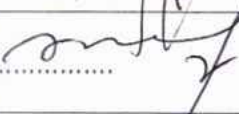
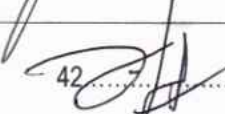
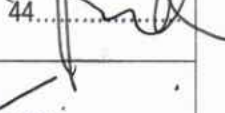
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

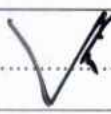
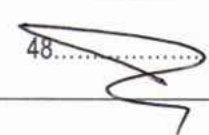
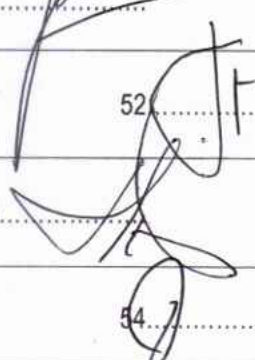
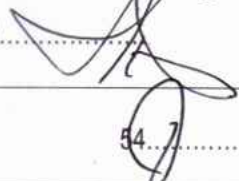
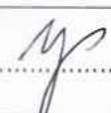
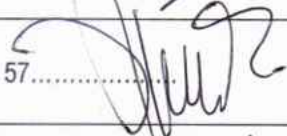
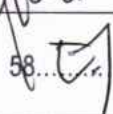
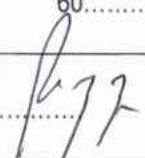
Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

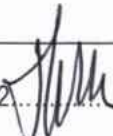
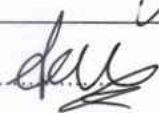
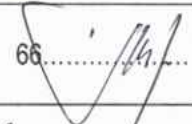
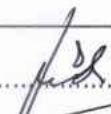
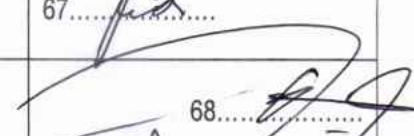
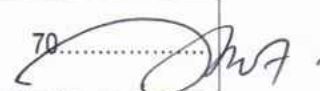
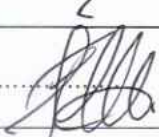
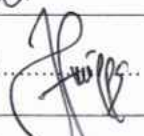
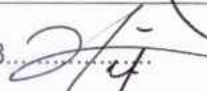
**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN
UMUM FRAKSI ATAS NOTA PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2025
HARI SENIN, TANGGAL 22 JUNI 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.	BUPATI	1.....
	NIK.		
2	DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T.,B.Eng.,M.Sc	WAKIL BUPATI	2.....
	NIK.		
3	AKBP ARIF FAZLURRAHMAN, S.H., S.I.K., M.Si	KAPOLRES	3.....
	NRP.		
4	LETKOL INF DENI SURYO ANGGO DIGDO	KOMANDAN KODIM 0812	4.....
	NRP.		
5	BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI	5.....
	NIK.		
6	HENDRO WASISTO, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	6.....
	NIK.		
7	Drs. MOH. NALIKAN, M.M.	SEKRETARIS DAERAH	7.....
	NIP. 19690703 198911 1 001		
8	PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M.	SEKRETARIS DPRD	8.....
	NIP.19691008 1995031 003		
9	JOKO NURSIYANTO, S.H, M.H	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	9.....
	NIP.19650706 199203 1 014		
10		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	10.....
	NIP.		
11	ETIK SULISTYANI , S.Sos, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	11.....
	NIP.19710722 199203 2 005		
12	A.FARIKH, S.H., M.M.	INSPEKTUR	12.....
	NIP. 19670516 199602 1 003		
13	Drs.FADHELI PURWANTO, M.M.	STAF AHLI BUPATI BID. KEMASYARAKATAN & SDM	13.....
	NIP.		

14	KANDAM, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670315 199412 1 003	STAF AHLI BUPATI BID. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	14.....
15	NIP.	STAF AHLI BUPATI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	15.....
16	H.RIDWAN FAUZI, S.Ag. M.H NIP.	KETUA PENGADILAN AGAMA	16.....
17	SUJARWO, ST., MM. NIP. 19740903 200112 1 005	KEPALA BEPPERIDA	17.....
18	FARAH DAMAYANTI Z., S.Sos., M.Si. NIP. 19730509 199803 2 005	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	18.....
19	JOHNY INDRIANTO FIRMANSYAH, S.STP., M.Si. NIP. 19830430 200112 1 002	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.....
20	Drs. MUHAMMAD SATUWI HERUWIDI, MM. NIP. 19690517 198809 1 001	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	20.....
21	EDY YUNAN A., SSTP, M.Si. NIP. 19801027 199912 1 001	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.....
22	SAMI'AN, S.E., M.M. NIP. 19700714 199303 1 001	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.....
23	NIP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.....
24	DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si. NIP. 19781204 201001 2 011	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.....
25	dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS. NIP.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	25.....
26	dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Kes. NIP. 19661113 199703 1 002	KEPALA DINAS KESEHATAN	26.....
27	Drs. SHODIKIN. M.Pd NIP. 19661019 198703 1 008	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	27.....
28	ANDHY KURNIAWAN, S.T, M.MT. NIP. 19750511 200604 1 011	KEPALA DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	28.....
29	ERWIN SULISTYA PAMBUDI, S.T., M.M. NIP. 19770327 200312 1 006	KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	29.....

30	Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.Si NIP. 19710424 199101 1 001	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	30..... 
31	UMURONAH, S.S.T., M.Kes. NIP.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	31.....
32	Drs. DIANTO HARI WIBOWO NIP. 19760410 199412 1 002	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	32..... 
33	GALIH YANUAR MEDI PRATAMA, S.E., M.Si. NIP.	KEPALA DINAS SOSIAL	33..... 
34	MOHAMMAD ZAMRONI, S.Sos, M.Si. NIP. 19730707 199303 1 010	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	34..... 
35	JARWITO, S.H. NIP. 19701022 199003 1 003	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35..... 
36	Dr. MUGITO, M.M. NIP. 196710241988091001	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	36..... 
37	YULI WAHYUONO, SH MM NIP.19660727 198903 1 006	KEPALA DINAS PERIKANAN	37..... 
38	Dr. SHOFIAH NURHAYATI, S.P., M.Si. NIP. 19720420 199602 2 001	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38..... 
39	ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si. NIP. 19750404 199602 1 003	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39..... 
40	SUGENG WIDODO, S.Sos. MM NIP. 19681219 198903 1 002	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40..... 
41	SITI RUBIKAH, S.E., M.Si NIP. 19700607 199803 2 003	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	41..... 
42	JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP. NIP.19780514 199711 1 001	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	42..... 
43	dr. ABDUR ROHMAN, Sp.PD. NIP.	DIREKTUR RSUD dr. SOEGIRI	43..... 
44	dr. HILDA NIP.	DIREKTUR RSUD NGIMBANG	44..... 
45	dr. MAYA DEWI H., M.MRS NIP.19830220 2010 2 016	DIREKTUR RSUD KARANGKEMBANG	45..... 

46	dr. PANJUMI KHORIDA, M.Kes. NIP. 19770420 200604 2 026	DIREKTUR RSUD KI AGENG BRONDONG	46..... 
47	ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos., M.M. NIP. 19720205 190201 1 003	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47..... 
48	MOCH.NAIM, S.Sos., M.Si NIP. 19690324 198903 1 007	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA	48..... 
49	M.RO'IS, SH, M.HUM NIP.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	49.....
50	NURUL MUKMININ, S.E., M.M NIP.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	50.....
51	NAZARUDDIN RAKHMAD SALEH, S.E., M.AP. NIP. 19760418 200312 1 004	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA	51..... 
52	TEGUH ALI SABUDI, S.T., M.M. NIP.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	52..... 
53	Dra. SRI RAHAYU, M.Si. NIP. 19690404 199503 2 003	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	53..... 
54	DAVID ASADI, SE NIP.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	54..... 
55	NANIK PURWATI, S.E., M.M. NIP.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH SETDA	55..... 
56	DANDOKO HADI SUSANTO, S.T., M.T. NIP.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	56..... 
57	NUR RAHMAWATI NIP.	PERUMDA BPR BANK DAERAH LAMONGAN	57..... 
58	L.M SYAHRIL NIP.	DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM	58..... 
59	 NIP.	PERUMDA PASAR	59.....
60	AGUNG YULIANTO NIP.	DIREKTUR UTAMA PD ANEKA USAHA LAMONGAN JAYA	60..... 
61	Reny candrap	Analisis Kebijakan Ahtis Muda	61..... 

62	Lina Agnita	staf	62..... 
63	Nrsdahun K	staf	63..... 
64	Dwi Aniani . s	— —	64..... 
65	Hasbi	Perisalan Legislatif DPRD Lamongan	65..... 
66	Siti Aminah Z.	staf	66..... 
67	M. AFANDI	— —	67..... 
68	SISWANTO	— —	68..... 
69	Pramita	staf	69..... 
70	Erwin Indahayati	staf	70..... 
71	Caelatul Magharoh	— —	71..... 
72	Vanny ROSA	Staf	72..... 
73	Millati Hanifa	staf	73..... 

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

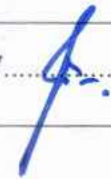

PUJOBROTO IRIAWAN. P. S.E., M.M., M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN
UMUM FRAKSI ATAS NOTA PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2025
HARI SENIN, TANGGAL 22 JUNI 2026**

NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS HENDRAWAN, SSTP.,M.AP. NIP. 19790208 199711 1 001	LAMONGAN	1..... 
2	RAKHMAT HIDAYAT, S.H.MM NIP.	TURI	2..... 
3	SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP NIP. 19851010 200602 1 001	DEKET	3.....
4	SUJIRMAN SHOLEH. SE.MM NIP. 19720909 200112 1 006	TIKUNG	4..... 
5	ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP.19811107 200604 1 011	KEMBANGBAHU	5.....
6	ABDUL HADI, S.E.,M.M NIP.	SARIREJO	6.....
7	GATOT SUGIHARTO, S.E., M.M. NIP.	SUKODADI	7..... 
8	RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M. NIP.	KARANGGENENG	8.....
9	AHMAD KURNIAWAN, S.STP.,M.Si NIP. 19850102 200312 1 001	SEKARAN	9.....
10	NURUL MISBAH, S.H.,M.M NIP.19700501 199302 1 005	PUCUK	10.....
11	TEGUH BAGIO, S.STP.,M.M NIP. 19780117 199711 1 002	MADURAN	11..... 
12	NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP,M.AP NIP.19840301 200212 1 002	BABAT	12..... 
13	SUTAJI, S.Kep, Ners, M.AP NIP. 19691210 199203 1 003	KEDUNGPRING	13.....
14	BAMBANG PURNOMO AP.M.M NIP. 19730922 199311 1 003	SUGIO	14.....
15	ANANG BUDI SANTOSA, S.H.,M.Si NIP.	MODO	15..... 

16	ANTON SUJARWO, S.Pd.,M.M	NGIMBANG	16.....
	NIP.		
17	M.EKO TRIPRASETYO, S.STP	BLULUK	17.....
	NIP.19871003 200602 1 001		
18	SYAM TEGUH W, SH., MM.	SAMBENG	18.....
	NIP. 19711031 199203 1 002		
19	ILYAS, S.Kep.,Ns	MANTUP	19.....
	NIP.		
20	HARWAH YUTOMO, SH., MM.	SUKORAME	20.....
	NIP. 19730201 199602 1 001		
21	ARIEF FAKHRUDIN AL HAKIM, S.STP.,M.Si	KARANGBINANGUN	21.....
	NIP.		
22	KHOIRUL MUHSININ, S.Pd	KALITENGAH	22.....
	NIP.19690503 200902 1 001		
23	SUTIKNO, S.Pd, M.M	GLAGAH	23.....
	NIP.19700309 199104 1 001		
24	TEGUH BAGIO, S.STP., M.M.	PACIRAN	24.....
	NIP.		
25	NURUL KHUMAIDAH, S.H.,M.M	BRONDONG	25.....
	NIP. 19710807 200112 2 002		
26	SUKUR, S.Pd.,M.Pd	LAREN	26.....
	NIP.19680621 199304 1 001		
27	TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE	SOLOKURO	27.....
	NIP. 19681130 201001 1 002		

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

PUJOBROTO IRIAWAN. P. S.E.,M.M.,M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003

DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA HARI KETIGA DALAM RANGKA
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
SENIN, 22 JUNI 2026



